

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang mewujudkan transformasi ekonomi dengan menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan upaya tersebut, ketahanan ekonomi daerah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan ekonomi yang stabil adalah bagian penting dari ketahanan nasional (Septiyanto *et al.*, 2024). Ketahanan ekonomi mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah dalam menghadapi guncangan ekonomi, menjaga stabilitas pertumbuhan, serta menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan ekonomi berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara individu maupun kelompok karena aspek ekonomi sangat terkait dengan penyediaan kebutuhan konsumsi, yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (Marlinah, 2017). Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan institusi yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi secara teratur. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan harus mempertimbangkan bahwa penguatan kelembagaan lokal merupakan salah satu sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial di suatu daerah (Aliim & Darwis, 2024).

Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya ekonomi dan keuangan guna memperkuat ketahanan ekonomi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan kedudukan pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistem vital dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang

berfungsi untuk menopang operasional pemerintahan secara menyeluruh (Ontorael *et al.*, 2018). Meskipun demikian, upaya penguatan tersebut sering kali terhambat oleh tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat, yang secara signifikan membatasi ruang gerak fiskal daerah dalam mengelola anggaran secara mandiri (Denisa & Nasution, 2025).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, struktur pendapatan daerah di Indonesia secara umum bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menurut Bahasoan *et al.*, dalam penelitian Kamala *et al.*, (2025) menyatakan bahwa otonomi daerah dianggap sebagai implementasi nyata dari prinsip desentralisasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penelitian Khasanah & Susilowati, (2025) desentralisasi adalah pembagian tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan asas otonomi. Menurut Suparmoko dalam penelitian Nasir, (2019) menuliskan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekosentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dapat disimpulkan bahwa, penerapan desentralisasi dan dekosentrasi merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri secara otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan tingkat kemandirian inilah yang secara fundamental membedakan peran kedua sumber pendapatan tersebut dalam struktur anggaran daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan refleksi kemandirian fiskal daerah, sedangkan transfer pusat berperan sebagai instrumen pemerataan dan

stabilisasi fiskal antarwilayah. Sinergi antara kedua sumber pendapatan ini sejalan dengan prinsip dasar kebijakan fiskal, di mana pemerintah mengoptimalkan pengumpulan dan pengalokasian uang negara guna menjaga stabilitas ekonomi (Eriyana *et al.*, 2025). Melengkapi dimensi fiskal tersebut, faktor demografi yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk berperan sebagai faktor strategis dalam menentukan skala ekonomi, di mana penguatan basis pasar domestik dan ketersediaan tenaga kerja produktif menjadi fondasi utama dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terjadi diseluruh dunia.

Ketahanan ekonomi daerah adalah kemampuan suatu wilayah untuk menjaga aktivitas ekonominya agar tetap stabil, mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat, beradaptasi dan pulih secara cepat ketika terjadi gangguan. Menurut Mayor & Ramos, (2020) ketahanan ekonomi daerah dikenal sebagai kemampuan ekonomi suatu wilayah untuk mempertahankan stabilitas aktivitas ekonomi dan pulih dari guncangan internal maupun eksternal termasuk pemulihan yang cepat setelah krisis. Menurut Martin & Sunley, (2015) dalam artikelnya yang berjudul "*On the Notion of Regional Economic Resilience: Conceptualization and Explanation*" gagasan ketahanan ekonomi regional diciptakan sebagai respons terhadap kelemahan teori pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya menekan laju pertumbuhan tanpa mempertimbangkan kemampuan suatu wilayah untuk mengatasi krisis ekonomi. Berawal dari gagasan tersebut, Martin & Sunley dalam penelitian Giannakis *et al.*, (2024) menekankan bahwa pentingnya menguji apakah diversifikasi ekonomi memang lebih efektif dalam memperkuat resiliensi eksternal daripada pola spesialisasi. Dalam konteks ini, diversifikasi dianggap sebagai komponen utama ketahanan

karena mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menyebarkan risiko (*dispersing the risks*) ke berbagai sektor (Goschin, 2019). Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan prospek ekonomi tetapi juga mendukung penguatan infrastruktur dan komunitas lokal, yang berdampak positif pada taraf hidup penduduk (Oprisan *et al.*, 2023). Statistik ekonomi daerah akan menunjukkan keberhasilan pembangunan ini secara kolektif.

Dalam hal ini, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berfungsi sebagai ukuran komprehensif dari kinerja ekonomi keseluruhan suatu kota. Perspektif yang lebih luas ini sangat penting untuk memahami sepenuhnya ketahanan ekonomi perkotaan, yang tidak hanya mencakup status lapangan kerja tetapi juga aktivitas ekonomi dan hasil yang menopang mata pencaharian penduduk kota. Konsep resiliensi kota mencakup berbagai aspek, seperti fungsi ekonomi, sosial, dan adaptasi terhadap gangguan eksternal serta kemampuan sistem perkotaan untuk mempertahankan fungsinya dan beradaptasi menuju keberlanjutan (Vasilevska & Slavković, 2023). Menurut Shi & Lu, (2024) menyatakan bahwa ada dua indikator paling penting untuk mengukur ketahanan ekonomi telah diidentifikasi sebagai PDB dan lapangan kerja. Secara spesifik, analisis PDB menyajikan cara yang tepat untuk mengukur ketahanan ekonomi dengan meneliti kapasitas suatu ekonomi untuk menahan guncangan. Hal ini melibatkan pemeriksaan perubahan tingkat pertumbuhan PDB dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan tingkat sebelum guncangan. Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini akan memfokuskan analisis ketahanan ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama untuk mengukur kapasitas stabilitas dan pemulihan ekonomi wilayah terhadap guncangan secara riil.

Menurut Badan Pusat Statistik, (2025) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di wilayah tertentu. PDRB adalah cerminan utama dari kekuatan dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah (Fadil *et al.*, 2025). Ada dua macam PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku, keduanya memiliki peran yang berbeda terhadap ekonomi suatu wilayah. Pada PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai nominal untuk menganalisis struktur, skala, dan kemampuan fiskal daerah berdasarkan harga pasar saat ini. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah karena nilainya tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Gulo *et al.*, 2025). Kapasitas pertumbuhan riil yang ditunjukkan dalam PDRB atas dasar harga konstan merupakan dasar utama bagi resiliensi ekonomi daerah. Dengan mengeliminasi distorsi harga indikator ini menunjukkan sejauh mana struktur ekonomi daerah mampu secara konsisten memproduksi nilai tambah, karena kekuatan ekonominya bergantung pada kapasitas produksi internal yang sebenarnya bukan hanya nilai nominal yang semu, daerah yang memiliki pertumbuhan produktivitas riil yang stabil cenderung lebih tahan terhadap perubahan pasar baik di tingkat nasional maupun internasional.

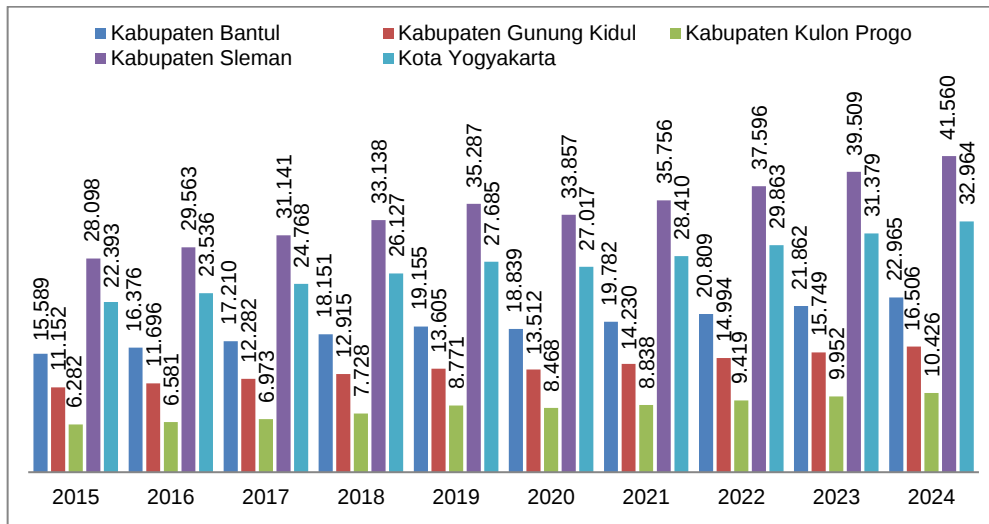
Analisis stabilitas pertumbuhan PDRB riil di tengah fluktuasi global merupakan indikator penting untuk memahami dinamika resiliensi ekonomi daerah dalam menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mendukung analisis mengenai perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perlu untuk melihat bagaimana karakteristik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian agar menjadi dasar untuk menginterpretasikan kondisi perekonomian daerah.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi resiliensi ekonomi daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah tersebut memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Keunikan tersebut terletak pada statusnya sebagai daerah istimewa yang diakui secara konstitusional melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan tersebut diberikan berdasarkan sejarah, hak asal-usul serta kontribusi kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dalam perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berbeda dengan dengan provinsi lainnya, jabatan gubernur DIY secara *ex officio* dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan wakil gubernur dijabat oleh Adipati Arya Paku Alam. Provinsi DIY memiliki kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rimapradesi & Surwandono, 2022), Provinsi DIY memiliki nilai-nilai kebudayaan yang kuat, pesona alam yang beragam, dan berbagai makanan yang dapat menarik wisatawan jika dibandingkan dengan dengan provinsi lain di Indonesia. Selain itu, dinas pariwisata DIY dalam penelitian Nur Aini *et al.*, (2022) telah menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota kebudayaan, kota pendidikan, dan kota destinasi wisata baik untuk wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Perpaduan antara sistem pemerintahan yang istimewa, kekayaan budaya, filosofi tata ruang, serta perannya sebagai pusat pendidikan menjadikan DIY memiliki identitas yang khas dan berbeda dari provinsi lainnya di Indonesia. Gambaran tidak langsung mengenai dinamika resiliensi ekonomi bisa dilihat melalui data PDRB atas dasar

harga konstan pada empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015-2024.

Gambar 1.1 Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah)



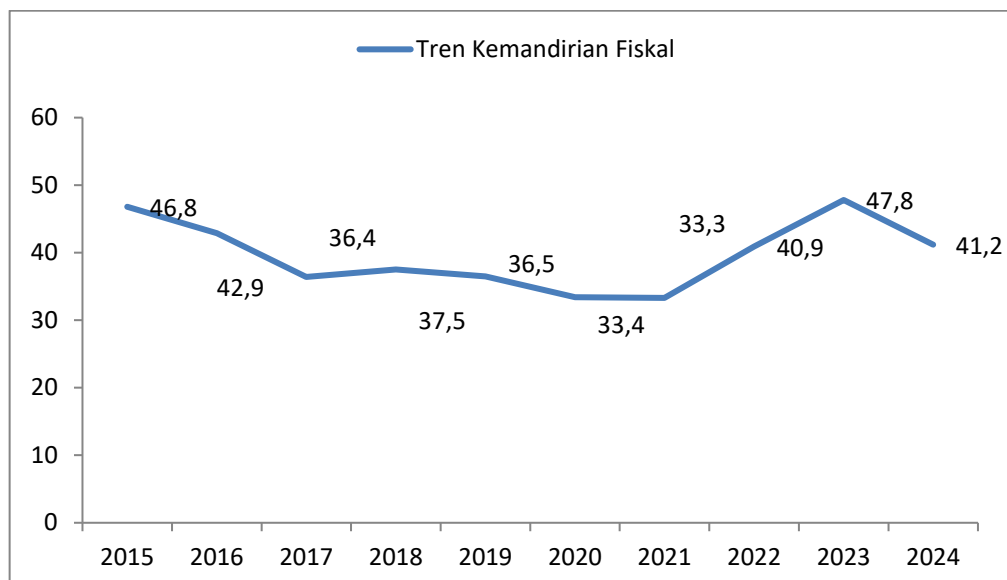
Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Data Diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan pada empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2015-2024. Kabupaten Sleman mencatat PDRB atas dasar harga konstan tertinggi. Angkanya melonjak dari Rp 28.098 miliar di Tahun 2015 menjadi Rp 41.560 miliar pada Tahun 2024. Kota Yogyakarta juga mencatat pertumbuhan yang signifikan dari Rp 22.393 miliar menjadi Rp 32.964 miliar. Kabupaten Bantul juga menunjukkan kenaikan yang mencolok dari Rp 15.589 miliar menjadi Rp 22.965 miliar. Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo mengalami peningkatan yang stabil, dimana Gunung Kidul dari Rp 11.152 miliar menjadi Rp 22.965 miliar dan Kulon Progo dari Rp 6.282 miliar menjadi Rp 10.426 miliar. Secara keseluruhan, semua daerah mengalami tren pertumbuhan jangka panjang yang positif dengan Kabupaten Sleman sebagai kontributor terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di kabupaten/kota

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif cukup resilien dalam menghadapi guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19, yang tercermin dari Tahun 2020 mengalami penurunan PDRB atas dasar harga konstan hampir di seluruh wilayah yang tidak terlalu dalam dibandingkan tren kenaikan sebelumnya. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara atau daerah (Gulo *et al.*, 2025). PDRB biasanya lebih tinggi seiring dengan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis di daerah tersebut (Astuti & Purwiyanta, 2024). Namun, nilai ekonomi yang besar ini hanyalah satu sisi, yang lebih penting adalah kemampuan sistem ekonomi untuk bertahan dalam jangka panjang.

Kondisi wilayah yang memiliki basis ekonomi yang kuat telah terbukti lebih mampu mengatasi perubahan dan mempertahankan stabilitas operasional mereka ketika menghadapi tekanan dari eksternal. Oleh karena itu, melakukan penilaian ketahanan ekonomi sangat penting karena struktur ekonomi negara yang beragam, populasi yang besar, dan kerentanan terhadap gangguan luar (Santoso & Samputra, 2024). Sejalan dengan teori Martin & Sunley yang menekankan bahwa ketahanan ditentukan oleh kecepatan pemulihan dan kemampuan daerah untuk menghindari kembali ke sistem ekonomi yang rentan terhadap guncangan. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal pemerintah daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka untuk menghasilkan dan mengelola pendapatan mereka sendiri sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah dan mempercepat pemulihan setelah terjadi guncangan. Tingkat kemandirian ini tercermin melalui rasio kemandirian keuangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kinanti & Santorry, 2024).

Gambar 1. 2 Tren Kemandirian Fiskal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah)



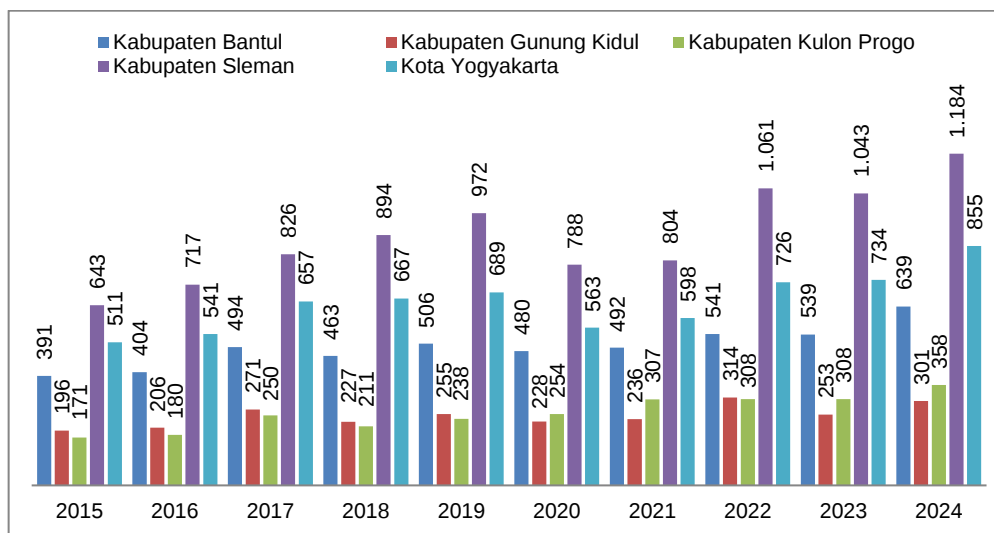
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2026)

Berdasarkan grafik 1.2 tren kemandirian fiskal di atas, pada tingkat pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024 terlihat belum bisa menjadi daerah yang memiliki kemandirian fiskal secara penuh. Tingkat kemandirian fiskal secara rata-rata berada pada posisi 39,67 yang artinya baru mulai menuju mandiri sehingga pemerintah pusat masih memiliki intervensi melalui pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023). Selain itu, menurut Paniradya Kaistimewaan, Provinsi DIY merupakan satu-satunya provinsi yang menerima dana keistimewaan dari pemerintahan pusat dengan alokasi yang selalu meningkat setiap tahun (Kinanti & Santorry, 2024). Berbagai urusan keistimewaan, seperti tata cara pengisian jabatan, kelembagaan, budaya, pertanahan, dan tata ruang, dapat didanai dengan dana ini. Pada penelitian

Kinanti & Santorry, (2024), dana keistimewaan tahun 2014-2024 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai rata-rata senilai Rp 43,53 Miliar. Seluruh urusan keistimewaan dan bidang keistimewaan tersebut tidak dapat meningkatkan PAD secara langsung, sehingga dana keistimewaan belum mampu mendorong peningkatan KKD pada kab/kota Provinsi DIY.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua wilayah memiliki kapasitas fiskal dan ketahanan ekonomi yang sama untuk menahan tekanan dari luar. Salah satu indikator yang signifikan mempengaruhi kapasitas fiskal daerah adalah PAD. Semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka kinerja keuangan pemerintah akan meningkat (Rahman & Altin, 2023). Menurut Jejen dalam penelitian Gulo *et al.*, (2025) semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik yang lebih baik, dan mendorong kegiatan ekonomi. Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PAD sebagian besar didominasi oleh sektor jasa. Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta bertumpu pada sektor jasa seperti pariwisata, pendidikan, perdagangan, akomodasi, restoran, dan jasa lainnya. Aktivitas ekonomi tersebut menjadi sumber penerimaan daerah melalui pajak daerah seperti pajak dan berbagai retribusi daerah. Untuk memahami bagaimana dinamika ini terjadi di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, grafik berikut menunjukkan perkembangan PAD dari tahun 2015-2024.

Gambar 1. 3 Data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa, Pendapatan Asli Daerah pada empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2015-2024. PAD di seluruh daerah cenderung stabil, meskipun Tahun 2020 mengalami kontraksi karena pandemi, namun terjadi pemulihan kuat pada Tahun 2021-2024. Kabupaten Sleman selalu mencatat jumlah penyumbang PAD tertinggi dari Tahun 2015-2024, angkanya melonjak dari 643 miliar rupiah di Tahun 2015 menjadi 1.184 miliar rupiah pada Tahun 2024. Kota Yogyakarta berada di posisi kedua, yang selalu menunjukkan peningkatan yang stabil dari 511 miliar rupiah di Tahun 2015 meningkat hingga 855 miliar rupiah pada Tahun 2024. Di sisi lain, Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten pada Tahun 2015-2019, meskipun mengalami penurunan pada Tahun 2020, di tahun setelahnya Kabupaten Bantul kembali mengalami pemulihan dan terus meningkat hingga mencapai 639 miliar rupiah pada Tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo mencatat angka penyumbang PAD relatif lebih rendah dibandingkan ketiga wilayah lainnya,

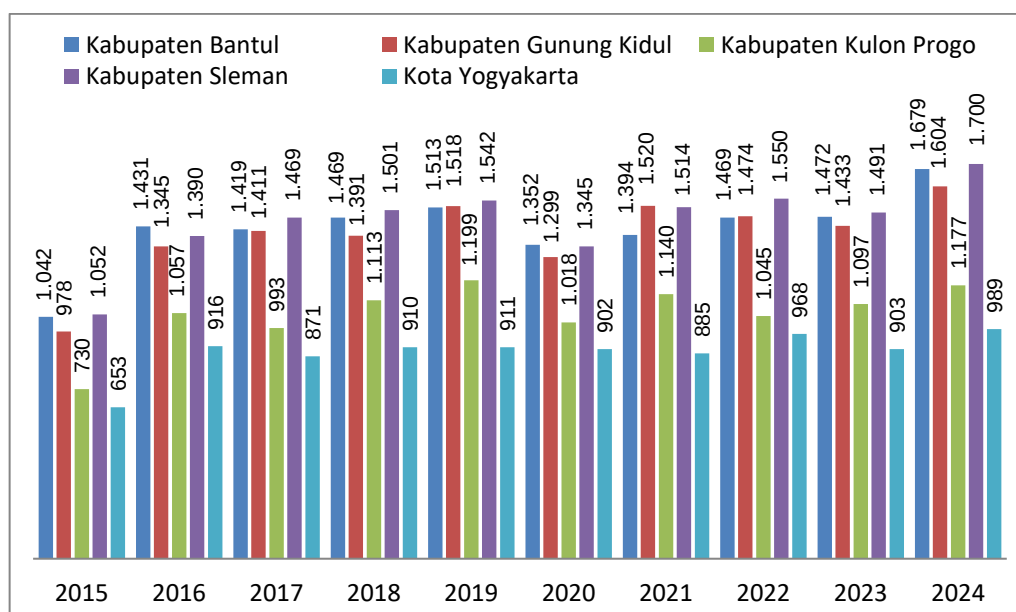
meskipun keduanya menunjukkan pola pertumbuhan jangka panjang yang positif.

Perbaikan sektor pariwisata dan digitalisasi sistem perpajakan daerah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan penelitian Sundawan & Laksmi, (2024) mengenai pengaruh sektor pariwisata terhadap PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan data 2004-2022 serta variabel sektor pariwisata dan pajak di daerah tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi industri pariwisata dengan meningkatkan objek wisata dan jumlah kamar hotel meningkatkan PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PAD yang tinggi menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih baik, yang membantu daerah mempertahankan ekonomi dan mendorong pemulihan PDRB atas dasar harga berlaku setelah guncangan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi pendapatan tersebut, pemerintah daerah perlu mengalokasikan porsi belanja daerah yang lebih besar pada sektor-sektor produktif (Syahrani *et al.*, 2025).

Selain PAD, kapasitas fiskal daerah untuk membelanjakan pada sektor-sektor produktif juga dipengaruhi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat. DAU, DAK, dan DBH merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD). Harapannya DBH akan memperkuat keadilan fiskal dan membantu pembangunan daerah penghasil agar tidak tertinggal dalam hal layanan publik dan infrastruktur. DAU ditujukan untuk menciptakan kesetaraan kemampuan keuangan antardaerah dan DAK diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai inisiatif tertentu yang diprioritaskan secara nasional, namun pelaksanaannya berada di tingkat daerah (Agastha & Rahman, 2025). Bagi

Provinsi DIY, pendapatan transfer memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD cenderung meningkat di setiap tahun, kontribusinya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap proporsi pendapatan transfer menjadi penting untuk menggambarkan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah pusat.

Gambar 1. 4 Data Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah)



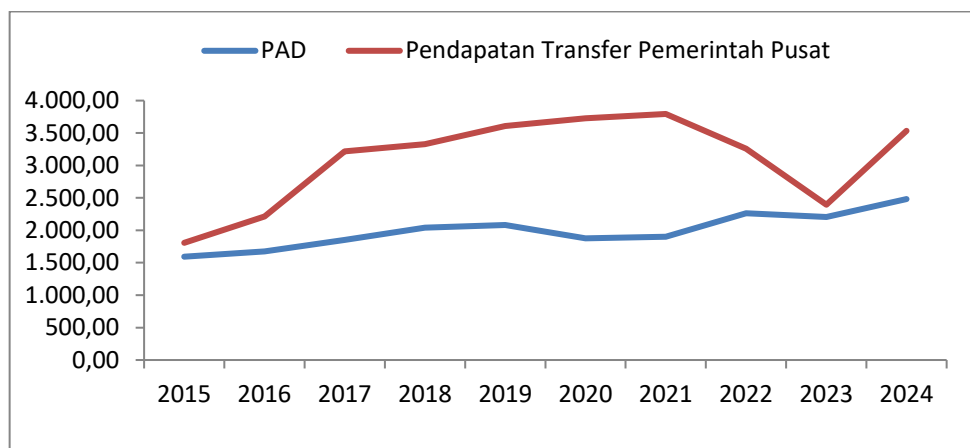
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pendapatan transfer pemerintah pusat kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2015-2024. Selama kurun waktu tersebut, pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami variasi. Pada Tahun 2015, Sleman dan Bantul memiliki nilai transfer tertinggi yaitu Sleman 1.052 miliar rupiah dan Bantul 1.042 miliar rupiah, sementara Yogyakarta tercatat terendah dengan 653 miliar rupiah. Terjadi lonjakan signifikan pada Tahun 2016-2019 di seluruh daerah, namun nilai

transfer menunjukkan penurunan pada Tahun 2020 di semua daerah karena adanya pandemi hingga terjadi krisis, tetapi mengalami perbaikan saat ekonomi mulai tumbuh pada Tahun 2021, Gunung Kidul dan Sleman memimpin dengan penerimaan transfer tertinggi. Pada Tahun 2022-2023 nilai transfer relatif stabil dengan kecenderungan menurun. Pendapatan transfer mencapai nilai tertinggi pada Tahun 2024 di semua daerah, dengan Sleman sebesar 1.700 miliar rupiah. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan nilai transfer pemerintah pusat di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat, meskipun menunjukkan penyesuaian akibat pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam mendukung dan menjaga stabilitas fiskal daerah saat terjadi gejolak ekonomi.

Besarnya pendapatan transfer menunjukkan kapasitas fiskal daerah dan tingkat ketergantungannya terhadap pusat. Oleh karena itu, prosedur penyalurannya dirancang dengan mempertimbangkan celah fiskal, potensi PAD, dan kebutuhan belanja untuk memastikan stabilitas dan keseimbangan pembangunan. Hal ini terjadi, karena ada kekhawatiran bahwa ketergantungan fiskal pada transfer pusat dapat menghambat upaya daerah untuk mengembangkan PAD (Agastha & Rahman, 2025). Pendapatan transfer yang meningkat menunjukkan peningkatan kebutuhan pembiayaan daerah, kebijakan stimulus fiskal, atau prioritas pembangunan tertentu dari pemerintah pusat. Sebaliknya, penurunan pendapatan transfer menunjukkan penyesuaian kebijakan fiskal nasional, peningkatan kapasitas fiskal daerah, atau alokasi anggaran pusat ke sektor atau wilayah lain.

Gambar 1. 5 Perbandingan Realisasi PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah)



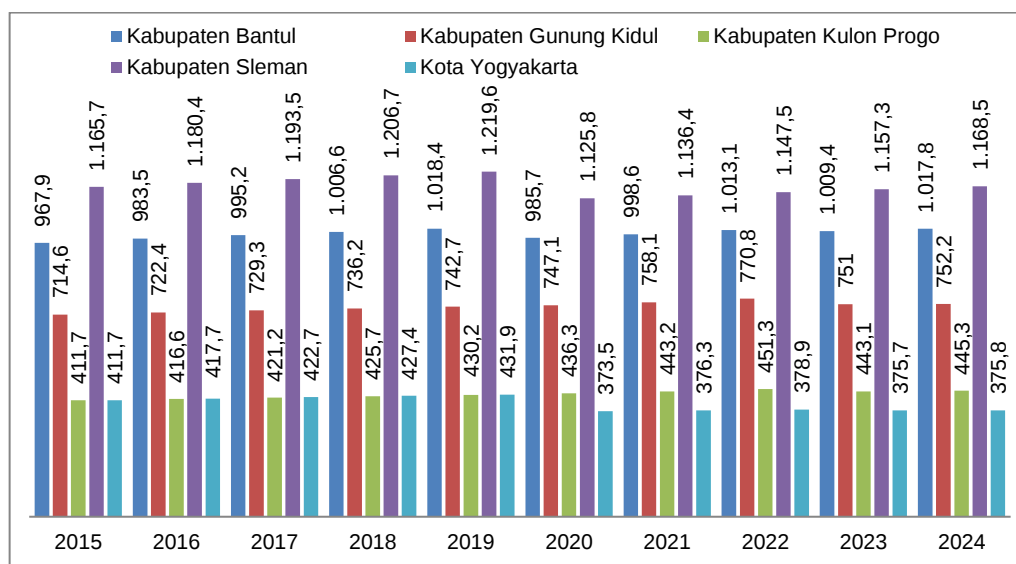
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2026)

Berdasarkan grafik 1.4 dapat dilihat perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024. PAD mengalami tren yang cenderung meningkat dari Rp 1.593,11 miliar pada Tahun 2015 menjadi Rp 2.481,51 miliar di tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Setelah itu, PAD kembali meningkat pada tahun 2022 dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024. Sementara itu, pendapatan transfer pemerintah pusat meningkat cukup pesat dari Rp 1.806,91 miliar pada tahun 2015 hingga mencapai puncaknya pada Tahun 2021 sebesar Rp 3.794,05 miliar. Namun, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi Rp 2.395,25 miliar, hingga pada Tahun 2024 meningkat menjadi Rp 3.534,50 miliar. Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat maupun penyesuaian alokasi anggaran nasional. Hal ini, terlihat bahwa pendapatan transfer pemerintah pusat masih memegang peranan penting dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah daerah di Provinsi DIY. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum

sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer, sehingga perlu dijelaskan melalui perspektif teori ekonomi yang relevan.

Sejalan dengan pentingnya pendistribusian dana transfer untuk melindungi stabilitas dan keseimbangan dalam pembangunan, dalam pemikiran neoklasik jumlah penduduk berfungsi sebagai alat ukur proporsionalitas untuk menentukan kebutuhan akan akumulasi modal dan layanan publik. Karakteristik penduduk DIY berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Meskipun jumlah penduduk tidak sebesar provinsi lainnya, DIY memiliki mobilitas penduduk yang tinggi karena menjadi salah satu pusat pendidikan nasional. Kondisi ini mendorong meningkatnya permintaan seperti fasilitas umum dan layanan jasa lainnya. Akibatnya, ketergantungan daerah pada proporsi dana transfer pusat untuk memastikan standar pelayanan minimal akan semakin besar.

Gambar 1. 6 Data Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024 (Ribu Jiwa)



Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Data Diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2015-2024. Jumlah penduduk di seluruh daerah cenderung stabil setiap

tahunnya. Di Tahun 2015, Sleman mencatat jumlah penduduk tertinggi di angka 1.165 ribu jiwa, sementara Yogyakarta dan Kulon Progo memiliki angka terendah yaitu 411 ribu jiwa. Pada Tahun 2016-2019 pertumbuhan penduduk tetap terjadi di seluruh daerah. Namun, pada Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan di Sleman, Bantul dan Yogyakarta, sementara di Gunung Kidul dan Kulon Progo justru mengalami kenaikan. Pada Tahun 2021-2023 peningkatan jumlah penduduk relatif stabil di sebagian besar daerah. Tren peningkatan berlanjut hingga Tahun 2024, tertinggi yaitu Sleman mencapai 1.168 ribu jiwa dan Bantul di angka 1.017 ribu jiwa. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan struktur persebaran penduduk kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif konstan dan tidak berubah secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir.

Penduduk masih terkonsentrasi di daerah dengan sumber daya ekonomi dan fasilitas yang lebih baik, sementara daerah lain berkembang lebih lambat. Selama periode tersebut, dinamika kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dianggap stabil dan terkendali. Menurut Badan Pusat Statistik, (2025) Laju pertumbuhan penduduk tahunan adalah indikator demografis yang menunjukkan fluktuasi rata-rata pertambahan jumlah jiwa selama satu tahun. Dapat disimpulkan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang stabil di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi prasyarat utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi antara penyediaan infrastruktur pelayanan publik dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat, dan jumlah penduduk memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan ekonomi di suatu daerah yang diukur dengan PDRB Adhk. PAD adalah ukuran

kemandirian fiskal yang menunjukkan kemampuan ekonomi daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, dana transfer pusat berfungsi sebagai alat stabilisasi untuk mencegah ketidakseimbangan fiskal. PDRB Adhk meningkat seiring dengan integrasi kedua sumber pendanaan dan didukung oleh dinamika populasi sebagai penggerak sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh setiap sektor perekonomian terhadap PDRB suatu wilayah, maka pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan baik (Tumaleno *et al.*, 2022). Pada akhirnya, hal ini memperkuat struktur ketahanan ekonomi wilayah terhadap ancaman dari luar. Oleh karena itu, analisis terhadap ketiga indikator tersebut menjadi penting dalam memahami dinamika ketahanan ekonomi di Provinsi DIY.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dalam kajian ketahanan ekonomi melalui tiga aspek. Pertama, berbeda dari penelitian sebelumnya Astuti & Purwiyanta, (2024) yang berfokus pada Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini mengalihkan fokus ke Provinsi DIY yang memiliki karakteristik yang unik dan didominasi oleh sektor tersier khususnya pariwisata, ekonomi kreatif, dan pendidikan hal ini memungkinkan terjadinya temuan yang lebih kontekstual. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru untuk mempelajari ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DIY yang diukur dengan PDRB atas dasar harga konstan dengan cara menyeluruh hubungan antara interaksi fiskal yang diukur dengan variabel PAD dan pendapatan transfer pemerintah pusat serta demografi yang diukur menggunakan variabel jumlah penduduk yang akan memberikan perspektif ekonomi kependudukan yang lebih modern dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menggunakan data terbaru 2015-2024. Ketiga, dengan fokus menggabungkan antara interaksi fiskal dan

demografi ini akan memberikan perspektif ekonomi kependudukan yang lebih modern. Sementara itu, pada penelitian Syahrani *et al.*, (2025) hanya menitik beratkan pada pengaruh PAD dan DAU terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto. Oleh karena itu, kesenjangan dalam penelitian mengenai ketahanan ekonomi daerah ini tampak dari minimnya studi yang menggabungkan secara menyeluruh aspek ekonomi dan demografi dalam analisisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor demografi, terutama jumlah penduduk yang berperan dalam menentukan skala ekonomi yang menjadi motor penggerak utama PDRB di wilayah tersebut masih belum banyak dikaji bersama dengan aspek fiskal, yaitu PAD dan pendapatan transfer pemerintah pusat.

Temuan penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik untuk pengembangan teori pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks negara berkembang, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Provinsi DIY dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berdaya saing kuat. Selain itu, penelitian ini ingin mengisi celah dalam literatur di tingkat kabupaten/kota di Provinsi DIY mengenai bagaimana interaksi fiskal dan demografi mempengaruhi ketahanan ekonomi dengan melakukan analisis terhadap keterkaitan antara PAD, pendapatan transfer pemerintah pusat, dan jumlah penduduk terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2015-2024. Dengan mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Ttransfer Pemerintah Pusat, dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketahanan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta?
2. Apakah pengaruh pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta?
3. Apakah pengaruh jumlah penduduk terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya studi ini kemungkinan akan bermanfaat. Berikut adalah manfaat dari studi tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait hubungan antara kapasitas fiskal, faktor demografis dan ketahanan ekonomi daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mengaplikasikan konsep-konsep teoritis yang telah dikuasai selama masa studi.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang metodologi penelitian kuantitatif, analisis data statistik, dan penerapan teori-teori ekonomi dan demografi dalam konteks riil.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan reputasi akademik perguruan tinggi melalui publikasi ilmiah serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang studi terkait ekonomi, demografi, dan perencanaan wilayah yang bermfaat bagi mahasiswa Universitas Bojonegoro, terutama di Fakultas Ekonomi.

d. Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif terkait pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Batasan Penelitian

Terdapat sejumlah pembatasan pada studi ini, antara lain:

1. Penelitian ini terbatas yang fokus pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.
2. Informasi yang di analisis adalah data ketahanan ekonomi daerah di Tahun 2015-2024.
3. Variabel-variabel yang dianalisis pada studi ini meliputi variabel dependen yang dinotasikan dengan Y: Ketahanan Ekonomi Daerah (diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan), dan variabel independen yang dinotasikan dengan X: Pendapatan Asli Daerah (X1), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X2), dan Jumlah Penduduk (X3).
4. Informasi yang dianalisis pada riset ini adalah data sekunder berupa data panel (gabungan data time series Tahun 2015-2024 dan crossection empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang diperoleh dari:
 - a. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
 - c. Sumber-sumber lain yang relevan dan terpercaya.
5. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis Regresi Data Panel.
6. Fokus dalam studi ini adalah analisis pengaruh variabel fiskal dan demografis terhadap ketahanan ekonomi daerah pada Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.